

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ahyar, H., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Tangerang: PT Erlangga.
- Airlangga, S. P. (2019). *Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis*.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Azizah, R., Zahroh Hayati. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3).
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. *Cepalo*, 3(1).
- Fuady, D. M. (2014). *Teori-Teori Besar dalam Hukum*: Bandung. Prenada Media.
- Gazali, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan. *Al' Adl Jurnal Hukum*, 14(2), 1–23.
- Gunawan, H. (2022). Analisa Etika Dan Keterampilan Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas (Roda Dua) Di Indonesia. *Sosains Jurnal Sosial dan Sains*, 2(8), 1–8.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01).
- Heri, S. H. (2022). Perlindungan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial* 2(2), 1–10.
- Herlin Setyorini, E. (2020). Ketaatan Hukum Berlalu Lintas Bagi Keselamatan. *Jurnal Reasch Hukum*. 4(1).

Himawati, Fenti M. S. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Jurnal

Kadaryanto, B. (2018). Konsep *Rechtsstaat* dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat MT Azhari). *Jurnal Al-Risalah*, 12(02), 1-24.

Khambali, M. (2014). Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1).

Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3).

Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742.

Manso, K., Lengkong, F. D. J., & Londa, Y. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik JAP*, 4(3).

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. *Jurnal Tatapamong*, 2(1).

Nanda, R. (2022). Difusi Inovasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2).

Orlando, G. (2021). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 2(1).

Panuntun, G. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Undiksha*, 3(1).

Pattiruhu, F. (2022). Penyuluhan Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement*

- Di Desa Oelomin Kabupaten Kupang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Desa*, 2(2).
- Putra Febrianto, S., Halim, B., & Patriansah, M. (2023). Kampanye Kesadaran Pentingnya Etika Berkendara di Kota Palembang. *VOCATECH: Vocational Education and Technology Journal*, 2(2).
- Rachman, B. A. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Satuan Lalu Lintas Melalui Tilang Terhadap Masyarakat yang Melanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pekalongan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Rahman, F. (2020). PERBANDINGAN TUJUAN HUKUM INDONESIA, JEPANG DAN ISLAM. *Khazanah Hukum*, 2(1), 32-40.
- Rais, T. (2020). Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 62-67.
- Ramadhani, P. A. (2022). Konsep Keadilan dan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Supremasi Hukum*, 18(1), 92-97.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67.
- Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(3).
- Setiyanto, Gubarto, & Wahyuningsih, E. S. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 1-13.
- Sinaga, Dahlan. (2018). Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Nusamedia.
- Soekanto, Soejono. 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Press
- Sudjana. (2021). Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Pelindungan dan Tujuan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 3(1).

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriadi, D. A. (2021). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Supriyanto, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Demak. *Jurnal Civic Hukum Makassar*, 4(1).
- Susanto, Y., Azhary, A., Rahmawaty, C., Novita, & Dharma, N. (2019). Teori Tujuan Hukum Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 129-139.
- Sutrisno, A., & Purnomosidi, A. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum: Media Sains Indonesia*.
- Syuib, M. S. M. (2023). Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Tilang Elektronik Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Mimbar Akademika*, 8(1).
- Tetuko, M., & Harjiyatni, F. R. (2022). Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda DIY). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(2), 884-895.
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 1–15.
- Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2).
- Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 311.
- Yusuf, M. D., Hilman, A., Wardioso, A., & Milthree Saragih, G. (2022). Kajian Terhadap Kekuatan-Kekuatan Sosial (*Social Forces*) dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 5(2), 363-371.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2012)

Surat telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. (1945). Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (1945)

Undang-undang Nomor Republik Indonesia 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Transaksi Elektronik. (2012)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Hak Cipta. (2014)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pos. (2009)

Internet

<https://www.youtube.com/live/LqOrDMoL05M?si=E15DZkLAtq6FWBSP>

<https://data.bantulkab.go.id/>